

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan



Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. 0756 21218
Fax. 0756 21218

Email : dinaskesehatan@pesisirselatankab.go.id
Website : dinkes.pesisirselatankab.go.id





**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 192 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai penjabaran dari RKPD Tahun 2020 di tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun bertujuan :

- a. untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2020; dan
- b. untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2020.

BAB III
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan turunan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020.
- (2) Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYAJIAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Juli 2019
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

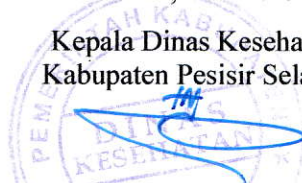
RENJA ini merupakan pengaplikasian pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pe Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Termasuk penyusunan RENJA bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan untuk pelaksanaan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini berpedoman kepada RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. RENJA Dinas Kesehatan tahun 2019 ini juga mengacu pada Visi Bupati Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu : ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”***

Penyusunan RENJA Tahun 2019 ini berdasarkan skala prioritas dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini dan masa yang akan datang, dimana dalam proses penyusunannya terjadi beberapa kendala dan permasalahannya. Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan bersama bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Dinas Kesehatan serta bagi kemajuan Pesisir Selatan.

Painan, Juli 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. Satria Wibawa, M. Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	29
2.4. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD	30
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V. PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan Nasional dan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2020 adalah tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 juga merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang mendukung Visi Bupati Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu : ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan***

yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera“. Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Misi Bupati Pesisir Selatan adalah *“Melaksanakan reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat”*

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan tahun anggaran 2020 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
2. Mengetahui evaluasi capaian kinerja RENJA Dinas Kesehatan tahun 2018 dan rencana pencapaian kinerja RENJA tahun 2020;
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2018 dan Capaian RENSTRA Dinas Kesehatan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam rencana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2018. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan dan realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul ttteerhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administrative maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas dan bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatann dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas	Kebutuhan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi (%)	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan (%)	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kebutuhan Administrasi Keuangan (%)	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor (%)	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (%)	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%

11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Penerangan Kantor (%)	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Pembayaran Langganan Koran	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat Dinkes yang dilaksanakan dan Makan Minum Tamu Dinkes dan Puskesmas	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
18.	Penyediaan Dana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	Persentase Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
19.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Persentase Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
20.	Penyediaan Dana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam	Tersedianya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
22.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Renstra, LKPI, LPPD, DPA dan DPPA	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Berkondisi Baik	100%	16.7%	33.4%	33.4%	100%	16.7%	83.5%	83.5%
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Gedung Dinkes	100%	16.7%	16.7%	16.7%	100%	16.7%	50.1%	50.1%
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Mobil Dinas Yang diadakan	100%	0	16.7%	16.7%	100%	16.7%	33.4%	33.4%

05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan Formal	100%	50.1%	16.7%	16.7%	100.0%	16.7%	83.5%	83.5%
	44. Legalisasi dan Registrasi Tenaga Fungsional Kesehatan	Jumlah SDK Puskesmas dan Rumah Sakit yang memiliki Registrasi dan Perizinan	100%	0%	16.7%	16.7%	100.0%	16.7%	83.5%	83.5%
15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar	95 %	15.8%	15.8%	15.3%	96%	15.8%	46.9%	49.4%
	01. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah Paket Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Diadakan	95%	15.8%	15.8%	15%	95%	15.8%	46.7%	49.1%
	02. Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	90%	15.0%	15.0%	15%	99%	15.0%	44.8%	49.8%
	07. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)	Lancarnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	16.7%	16.7%	16%	96%	16.7%	49.3%	49.3%
16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Visite Rate	95 %	15.8%	15.8%	14.8%	93.2%	15.8%	46.4%	48.9%
	02. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Persentase Keluarga Kelompok Resiko Tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan Jaringannya termasuk pada Daerah Terpencil	95%	15.8%	15.8%	15.0%	94.7%	15.8%	46.7%	49.1%
	09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk Posko-Posko Kesehatan dalam Rangka Hari Raya dan even-even Daerah	95%	15.8%	15.8%	14.5%	91.6%	15.8%	46.2%	48.6%

	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (BOK)	Tersedianya Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	95%	15.8%	15.8%	14.0%	88.4%	15.8%	45.7%	48.1%
	Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyehat tradisional yang dipantau dalam pelayanan kesehatan.	95%	15.8%	15.8%	14.2%	89.7%	15.8%	45.9%	48.3%
	Pelayanan Kesehatan Tradisional (BATRA)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	95%	15.8%	15.8%	15.0%	94.7%	15.8%	46.7%	49.1%
	Penaggulangan Kegawat Daruratan Terpadu	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	95%	15.8%	15.8%	15.2%	96.0%	15.8%	46.9%	49.3%
	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina	80 %	13.3%	13.3%	11.2%	84.0%	13.3%	37.9%	47.3%
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Bahan Berbahaya	Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina	80%	13.3%	13.3%	11.2%	84.0%	13.3%	37.9%	47.3%
19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Nagari Siaga Aktif	100%	16.7%	13.3%	11.7%	88.1%	16.7%	45.1%	45.1%
01.	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Persentase ketersediaan Media promosi	100%	16.7%	16.7%	16%	94.8%	16.7%	49.1%	49.1%
11.	Kegiatan Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Posyandu Mandiri Terbinanya Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	100%	16.7%	16.7%	16%	97.2%	16.7%	49.5%	49.5%

07.	Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga Aktif yang dibina	100%	16.7%	16.7%	16%	96.0%	16.7%	49.3%	49.3%
		Jumlah Stratifikasi Nagari Siaga Mandiri								
	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten	Jumlah Profil Kesehatan dan Pembinaan terhadap Puskesmas	100%	16.7%	16.7%	11%	64.2%	16.7%	44.0%	44.0%
	Implementasi Gerakan Masyarakat Sehat		100%	16.7%	0.0%	0%	0.0%	16.7%	33.3%	33.3%
20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI	Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100%	16.7%	15.8%	14.7%	92.6%	16.7%	48.0%	48.0%
02.	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Persentase Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	100%	16.7%	16.7%	15.8%	94.8%	16.7%	49.1%	49.1%
08.	Pemantauan Status Gizi Masyarakat	Terpantaunya Status Gizi dan Validasi Data, Pemantauan Garam Beryodium dan Pelacakan Gizi Buruk	90%	15.0%	15.0%	13%	88.0%	15.0%	43.2%	48.0%
09.	Pembinaan Monitoring Program Gizi Masyarakat	Terlatihnya dan termonitornya program perbaikan gizi	95%	15.8%	15.8%	15%	94.7%	15.8%	46.7%	49.1%
21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Jumlah nagari ODF (Open Defecation Free)	100%	16.7%	16.2%	15.8%	97.7%	16.7%	49.1%	49.1%
01.	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Pengawasan, Pembinaan, Sanitasi Dasar, TTU dan TPM	97%	16.2%	16.2%	15.8%	97.7%	16.2%	48.1%	49.6%
		Jumlah Pelatihan Wirausaha Sanitasi dan Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan								
		Jumlah Pertemuan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan, Sosialisasi UKL/UPL								
		Jumlah Dokumen Lingkungan bagi Puskesmas								

08.	Pendamping PAMSIMAS	Jumlah Pemantauan dan Pembinaan Lokasi Paska PAMSIMAS	85%	14.2%	14.2%	14.0%	98.8%	14.2%	42.3%	49.8%
		Jumlah Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat								
09.	Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	jumlah Pemantauan dan Pembinaan terhadap Rumah Sehat,	100%	16.7%	16.7%	14.0%	84.0%	16.7%	47.3%	47.3%
		Jumlah Monitoring Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman								
		Jumlah Pertemuan Limbah Limbah Medis Puskesmas								
10.	Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah Pemeriksaan Rutin Kualitas DAM dan Sumber Air, Pengawasan Kualitas Air Minum dan DAM	85%	14.2%	14.2%	14.0%	98.8%	14.2%	42.3%	49.8%
		Jumlah Pelatihan Hygiene Sanitasi Pengelolaan DAM								
		Jumlah Pembelian Reagen Kimia dan Bakteriologis Pemeriksaan Sampel Air								
11.	Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat	Jumlah Forum kabupaten Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan, serta Kelompok Kerja Nagari yang dibina	89%	14.8%	14.8%	14.0%	94.4%	14.8%	43.7%	49.1%
12.	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Kelompok UKK yang dibina dan Jumlah Pertemuan kesehatan Olah Raga	90%	15.0%	15.0%	14.0%	93.3%	15.0%	44.0%	48.9%
22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Succes Rate TB	98 %	16.3 %	16.3 %	14.5 %	88.5 %	16.3 %	47.1 %	48.1 %
01.	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Jumlah Penyemprotan Sarang Nyamuk pada Perumahan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan	98%	16.3%	16.3%	15.3%	93.7%	16.3%	48.0%	48.9%

08.	Peningkatan Imunisasi	Persentase Pelayanan Imunisasi	98%	16.3%	16.3%	12.9%	79.0%	16.3%	45.6%	46.5%
05.	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	98%	16.3%	16.3%	15%	89.4%	16.3%	47.3%	48.2%
06.	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Jumlah Penyakit Infeksi dan Menular (Endemik) di Kabupaten Pesisir Selatan Kecacingan dan Filariasis (Kaki Gajah)	98%	16.3%	16.3%	14%	86.9%	16.3%	46.9%	47.8%
		jumlah Surveilans Aktif Filariasis dan Pengawasan Penyakit Filariasis								
05.	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah laporan Surveyance lengkap dan tepat waktu	100%	16.7%	16.7%	15%	91.2%	16.7%	48.5%	48.5%
		Jumlah Penerbitan Bulletin Epidemiologi Kab. Pesisir Selatan (2 Edisi)								
13.	Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap KLB/Wabah dan Bencana	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kewaspadaan Dini KLB/Wabah dan Bencana	95%	15.8%	15.8%	15%	92.8%	15.8%	46.4%	48.8%
15.	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB	Persentase Bencana/KLB yang dilakukan Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Secara Cepat	100%	16.7%	16.7%	14.3%	85.8%	16.7%	47.6%	47.6%
	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya kualitas Pelayanan kesehatan	100%	16.7%	16.7%	15.0%	90.1%	16.7%	48.4%	48.4%
	Akreditasi, Sertifikasi dan Registrasi Kesehatan	Terlaksananya Puskesmas Terakreditasi di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	16.7%	16.7%	14.9%	89.4%	16.7%	48.2%	48.2%
		Terlaksananya Pembinaan Pasca Akreditasi								

	Pembinaan dan Evaluasi Monitoring dr/drg/Bidan PTT	Jumlah dr/drg/bidan PTT yang dibina	100%	16.7%	16.7%	15.3%	91.8%	16.7%	48.6%	48.6%
	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan peningkatan kinerja	95%	15.8%	15.8%	14.5%	91.6%	15.8%	46.2%	48.6%
	Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional	Jumlah tenaga fungsional puskesmas dan rumah sakit yang dibina	100%	16.7%	16.7%	15.2%	91.2%	16.7%	48.5%	48.5%
	Akreditasi, Sertifikasi dan Registrasi Kesehatan (DAK)	Terlaksananya Puskesmas Terakreditasi di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	16.7%	16.7%	15.2%	91.2%	16.7%	48.5%	48.5%
25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU	Persentase Puskesmas dan Pustu yang memiliki sarana prasarana sesuai standar	100 %	16.7%	16.7%	14.9%	89.1%	16.7%	48.2%	48.2%
	Pengadaan Puskesmas Keliling	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	100%	16.7%	16.7%	13.4%	80.4%	16.7%	46.7%	46.7%
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas-puskesmas	100%	16.7%	16.7%	14.2%	85.2%	16.7%	47.5%	47.5%
06.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)	Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan	100%	16.7%	16.7%	15.7%	94.2%	16.7%	49.0%	49.0%
26.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Representatif	100%	16.7%	16.7%	16.0%	96.0%	16.7%	49.3%	49.3%
30.	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	Tersedia Dana Untuk Operasional Penunjang Kegiatan	100%	16.7%	16.7%	15.5%	93.0%	16.7%	48.8%	48.8%

	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK)	Tersedianya Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Gigi di Puskesmas	100%	16.7%	16.7%	13.8%	82.8%	16.7%	47.1%	47.1%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)	Perbaikan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	100%	16.7%	16.7%	14.9%	89.4%	16.7%	48.2%	48.2%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas	Tersedianya IPAL Untuk Puskesmas	100%	16.7%	16.7%	15.3%	91.8%	16.7%	48.6%	48.6%
26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	16.7%	0.0%	-	-	20%	36.7%	36.7%
18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	20.0%	0.0%	-	0	20.0%	40.0%	40.0%
27.	Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	20.0%	0.0%	-	0	20.0%	40.0%	40.0%
28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Penduduk yang memiliki JKN	100%	16.7%	16.7%	11.7%	72.0%	16.7%	45.0%	45.0%
01.	Kemitraan Asuransi Kesehatan masyarakat	Pembayaran Premi Asuransi untuk Jamkesda	100%	16.7%	16.7%	13.9%	83.4%	16.7%	47.2%	47.2%
09.	Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien Gratis	100%	16.7%	16.7%	14.3%	85.8%	16.7%	47.6%	47.6%
11.	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Rumah Sakit	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien JKN, Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Untuk Masyarakat	100%	16.7%	16.7%	16.0%	96.0%	16.7%	49.3%	49.3%
12.	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Rumah Sakit	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien JKN yang Dirujuk, Rawatan, Persalinan, dll	90%	15.0%	15.0%	14.2%	94.7%	15.0%	44.2%	49.1%

30.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LANSIA	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	80 %	13.3%	13.3%	12.3%	92.3%	13.3%	39.0%	48.7%
01.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia (Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	80%	13.3%	13.3%	12.3%	92.3%	13.3%	39.0%	48.7%
32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	92 %	15.3%	15.3%	14.1%	92.2%	15.3%	44.8%	48.7%
04.	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	90%	15.0%	15.0%	13.4%	89.3%	15.0%	43.4%	48.2%
05.	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Kelompok Anak Sekolah UKS dan UKGS dan Peduli Remaja (PKPR) Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	95%	15.8%	15.8%	14.2%	89.7%	15.8%	45.9%	48.3%
	Usaha Kesehatan Ibu dan anak (Jampersal)	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	90%	15.0%	15.0%	14.8%	98.7%	15.0%	44.8%	49.8%
33.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)	Persentase Nagari dengan Posbindu PTM	70 %	11.7%	12.3%	11.9%	97.0%	12.3%	35.9%	51.3%
	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah Pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak menular	60%	10.0%	10.0%	9.80%	98.0%	10.0%	29.8%	49.7%

		Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit akibat Rokok	Jumlah Pencegahan dan pengendalian Penyakit akibat rokok dan deteksi dini	60%	10.0%	10.0%	9.70%	97.0%	10.0%	29.7%	49.5%
	03.	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra	Persentase Kecamatan/Puskesmas yang Mempunyai Daerah Penyelaman yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Matra	75%	12.5%	12.5%	12.0%	96.0%	12.5%	37.0%	49.3%
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ yang dilayani	100%	16.7%	16.7%	16.2%	97.2%	16.7%	49.5%	49.5%
38.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	Persentase Rujukan dari Pelayanan Primer ke Sekunder	90%	15.0%	15.0%	14.6%	97.3%	15.0%	44.6%	49.6%
	01.	Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan	Pembayaran honorarium pelaksanaan dan insentif jasa medis paramedis tenaga PNS / NON PNS, terlaksananya operasional RSUD, terlaksananya pengadaan di RSUD	90%	15.0%	15.0%	14.6%	97.3%	15.0%	44.6%	49.6%
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya Pembinaan dan Pelatihan Bimtek Aset dan Pengelolaan Aset	100%	16.7%	16.7%	13.8%	82.8%	16.7%	47.1%	47.1%
		Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Tersedianya Pembinaan dan Pelatihan Bimtek Aset dan Pengelolaan Aset	100%	16.7%	16.7%	13.8%	82.8%	16.7%	47.1%	47.1%

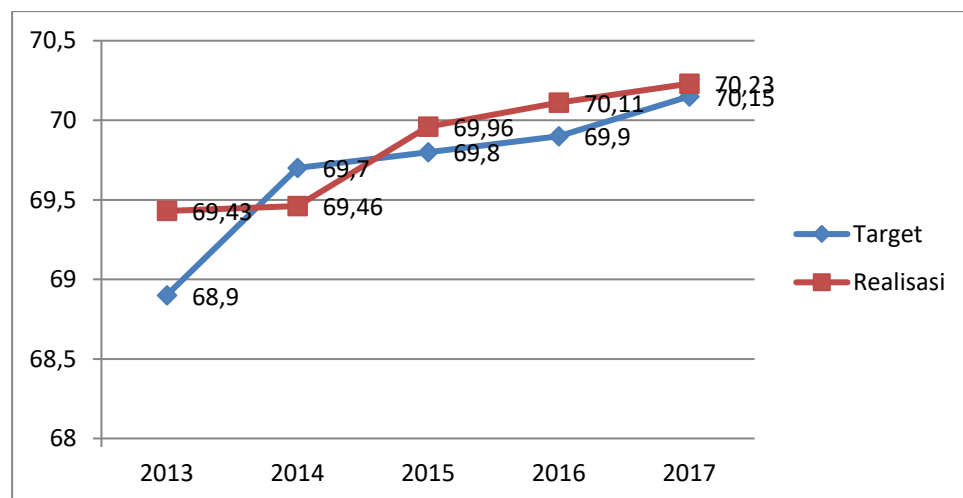
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2018 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan, isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Melihat pencapaian hasil pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, maka capaian prioritas indeks pembangunan kesehatan (HDI) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang menjadi target pembangunan Bidang Kesehatan adalah indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Adapun target dan capaian UHH Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2011-2016 dapat dilihat dari tabel berikut.

**Grafik Cakupan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pesisir Selatan
Periode Tahun 2013-2017**



Sumber : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2018

Jika dilihat dari grafik diatas, maka dapat dilihat realisasi 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 realisasi UHH selalu melebihi target.

2. Penurunan Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah dan angka kematian ibu maternal, bayi dan anak balita (AKI dan AKB) dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) serta meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak di sarana pelayanan kesehatan.

**Tabel : Angka Kematian Ibu (AKI)
Tahun 2016, 2017 dan 2018**

Indikator	2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKB)	98/ 100.000 KH	89/ 100.000 KH	109%	96/ 100.000 KH	92.3/ 100.000 KH	103.27%
/ 100.000 KH	9 org	8 org		9 org	8 org	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan yaitu dari 109% pada tahun 2017 menjadi 103.27% pada tahun 2018 dari 8670 Keahiran Hidup. Angka Kematian Ibu pada Kabupaten Pesisir Selatan ini masih dibawah standar Nasional (SDGs) yaitu 102/ 100.000 KH pada tahun 2021. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlah ibu yang meninggal tidak terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 8 orang pada tahun 2017 menjadi 8 orang pada tahun 2018. Dari jumlah kelahiran di Kabupaten Pesisir Selatan terjadi penurunan dari tahun 2017 sebanyak 8957 menjadi 8670 tahun 2018.

3. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian bayi sama pentingnya dengan Angka Kematian Ibu, karena merupan 2 indikator yang sangat mempengaruhi Usia Harapan Hidup.

**Tabel : Angka Kematian Bayi (AKB)
Tahun 2016 s/d 2018**

Indikator	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH	25/1000 KH	5/1000 KH	180%	24/1000 KH	6/1000 KH	175%	23/1000 KH	10.84 / 1000 KH	152.8%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian dari tahun 2016 sebesar 180% menjadi 152,8% tahun 2018.

4. Persentase Fasyankes Terakreditasi

**Tabel : Capaian Indikator
Persentase Fasyankes terakreditasi
Tahun 2016 s/d 2018**

Indikator	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Fasyankes terakreditasi	25%	20%	80%	50%	60%	120%	75%	81%	108%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian dari 120% tahun 2017 menjadi 108% di tahun 2018. Tetapi capaian ini masih dalam kategori berhasil karena sudah diatas 100%. Hal ini sangat dimungkinkan karena ada komitmen bagi Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan, dimana persyaratan akreditasi Puskesmas sampai tahun 2019 akan menjadi salah satu syarat credensialing dari BPJS Kesehatan untuk bekerjasama dengan Puskesmas.

Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2017**

Fasyankes	Jumlah	Terakreditasi	
		2016	2017
Puskesmas	18	2	11
Rumah sakit	2	0	1
JUMLAH	20	2	12

5. Prevalensi Balita Stunting

Gambaran Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel : Capaian Pravalensi Balita Stunting
Tahun 2016 s/d 2018**

Indikator	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi balita Stunting	20%	11,4%	143 %	19%	11,9 %	137 %	17%	14,9 %	112,3 %

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian tahun 2018 sebesar 112,3%, terjadi penurunan capaian dari tahun 2016.

Status gizi merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2009) mengemukakan bahwa anak dengan status gizi baik akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik serta produktivitas kerja yang lebih tinggi dimasa yang akan datang. Sebaliknya gizi kurang tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan kematian, tapi juga menurunkan produktifitas, menghambat sesl-sel otak yang mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan. Status gizi yang rendah juga akan berdampak terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan Indikator Status suatu bangsa.

6. CDR TB Paru

Gambaran Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel : Capaian CDR TB Kab. Pesisir selatan
Tahun 2016 s/d 2018**

Indikator	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Fasyankes terakreditasi	43%	49%	113%	46%	38,7%	84,1 %	65%	36%	55,3 %

Berdasarkan data diatas bahwa terdapat peningkatan target persentase CDR dari tahun 2016 sebesar 43%, tahun 2017 sebesar 46%, dan tahun 2018 sebesar 65%, namun tidak diiringi dengan peningkatan realisasi dan hasil pencapaian dimana terdapat penurunan angka CDR dari tahun 2016 sebesar 49% dengan capaian sebesar 113%, tahun 2017 sebesar 38.7% dengan capaian 85.1% dan realisasi angka CDR tahun 2018 sebesar 36% dengan capaian program sebesar 55.3%. CDR TB Paru menggambarkan cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif yang diperoleh berdasarkan perhitungan angka insiden kasus TB Paru BTA Positif dikali dengan jumlah penduduk.

7. Persentase Rumah tangga Ber-PHBS

Gambaran Pencapaian indikator tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel : Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 s/d 2018**

Indikator	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	65%	21,6%	33,2 %	70%	23,77 %	33,9 %	75%	60%	80%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menjadi 80%.

TABEL 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2017 (thn n-2)	2018 (thn n-1)	2019 (thn n)	2020 (thn n+1)	2016 (thn n-2)	2017 (thn n-1)	2019 (thn n)	2020 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			24/ 1000 KH	23/ 1000 KH	22/ 1000 KH	21/ 1000 KH	5/ 1000 KH	6/ 1000 KH	7/ 1000 KH	8/ 1000 KH	
2	Angka kelangsungan hidup bayi											
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			34	33	32	31	35	34	32	31	
4	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup			24	23	22	21	25	24	22	21	
5	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup			98/ 100.000 KH	96/ 100.000 KH	94/ 100.000 KH	92/ 100.000 KH	67/ 100.000 KH	89/ 100.000 KH	90/ 100.000 KH	92/ 100.000 KH	
6	Rasio posyandu per satuan balita			1 : 68	1 : 50	1 : 50	1 : 50	1 : 68	1 : 68	1 : 55	1 : 50	
7	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			0.25	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.24	0.25	
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088	

9	Rasio Dokter per satuan penduduk			0.088	0.088	0.088	0.088	0.088	0.09	0.22	0.33	
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			0.13	0.13	0.13	0.13	0.123	0.127	0.319	0.44	
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			80	80	90	90	77.2	79.8	90	100	
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			90	90	93	95	92.5	87.9	100	100	
13	Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization</i> (UCI)			8	90	92	94	97.9	91	92	92	
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum(standar yang digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari)											
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak			85	90	95	100	98.8	96.1	95	95	

17	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk			2	2	2	2	2	4	2	2	
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani			100%	100%	100%	100%	86%	109%	100%	100%	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			843	923	1058	1058	833	843	1058	1058	
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			0.16	0.18	0.18	0.18	183	186	211	211	
21	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			18	18	18	18	5	4.8	4	4	
22	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS			769	923	1058	1058	833	843	1058	1058	
23	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS			96%	97%	96%	96%	96%	96%	97%	97%	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

25	Penderita diare yang ditangani			100%	100%	100%	100%	87%	84%	100%	100%	
26	Angka kejadian malaria			< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	0.13 / 1000 Penduduk	0.29 / 1000 Penduduk	0/ 1000 Penduduk	0/ 1000 Penduduk	
27	Tingkat Kematian akibat malaria			0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida			0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Proporsi Anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat			0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi			0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir			0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS			100	100	100	100	100	100	100	100	

33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			7%	6.50%	6%	5.50%	9.40%	4.80%	5.80%	5.30%	
34	Cakupan kunjungan bayi			85%	86%	87%	88%	97.6	94.9	95	95	
35	Cakupan Puskesmas			133%	133%	133%	133%	133%	133%	133%	133%	
36	Cakupan Pembantu Puskesmas			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
37	Cakupan kunjungan ibu hamil k4			79	82	85	87	96	89.9	100	100	
38	Cakupan pelayanan nifas			80	83	86	88	96	89.9	100	100	
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			80	80	80	80	47,7	44,4	50	60	
40	Cakupan pelayanan anak balita			80	80	80	80	56	54,4	90	95	
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin											
42	cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat			65	70	100	0	93,84	97,6	100	100	

43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin			65%	70%	75%	80%	64.50%	67%	78%	80%	
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)			80	82.5	85	87.5					
45	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			90	95	95	95	100	100	100	100	

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan capaian / kondisi pada saat ini yaitu :

1. Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat.
2. Masih tingginya kematian ibu maternal (AKI) dan jumlah kematian bayi (AKB) sehingga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
3. Masih tingginya prevalensi balita gizi kurang dan stunting.
4. Masih tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular.
5. Masih rendahnya kualitas dan akses sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat.
6. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) mandiri.
8. Belum optimalnya sumber daya kesehatan.
9. Belum optimalnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat.
10. Belum optimalnya dukungan manajemen Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan.

Maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan pokok dan menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yaitu :

1. Belum optimalnya kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kurang merata.
2. Kualitas / mutu pelayanan kesehatan belum optimal dan belum sesuai standard.
3. Akses pelayanan yang terhambat karena sistem rujukan penyakit yang belum optimal dan masyarakat belum semua mendapatkan pelayanan melalui JKN dikarenakan masyarakat belum memiliki JKN.
4. Keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Sistem akreditasi puskesmas dalam pelayanan belum terpenuhi.
7. Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi virulensi agen penyakit.
8. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat dikarenakan masih rendahnya cakupan pelayanan masyarakat dan promosi kesehatan serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap PHBS.

9. Koordinasi lintas program belum terpadu.
10. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus
11. Pembiayaan/anggaran pembangunan kesehatan masih rendah.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran tahun 2017 yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan sebanyak Rp. 75.785.563.561,- dengan realisasi anggaran Rp. 59.563.318.842,- persentase realisasi anggaran sebesar 78,59%.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan 16 Program dan 72 Kegiatan, dan pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 16 Program dan 74 kegiatan.

Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	100 %	3,568,371,840	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	100 %
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi (%)	100%	384,687,360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi (%)	100%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan (%)	100%	847,359,360	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan (%)	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Administrasi Keuangan (%)	100%	300,672,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Administrasi Keuangan (%)	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor (%)	100%	353,808,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor (%)	100%
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (%)	100%	24,019,200	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (%)	100%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)	100%	192,559,680	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)	100%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100%	109,728,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Komponen Penerangan Kantor (%)	100%	186,140,160	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Komponen Penerangan Kantor (%)	100%

9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	121,245,120	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Jumlah Pembayaran Langganan Koran	100%	23,915,520	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Jumlah Pembayaran Langganan Koran	100%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Jumlah Rapat Dinkes yang dilaksanakan dan Makan Minum Tamu Dinkes dan Puskesmas	100%	356,209,920	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Jumlah Rapat Dinkes yang dilaksanakan dan Makan Minum Tamu Dinkes dan Puskesmas	100%
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Persentase Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	100%	194,400,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Persentase Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	100%
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Persentase Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	238,723,200	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Persentase Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Tersedianya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100%	15,552,000	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Tersedianya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100%
15	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Tersedianya Renstra, LKPJ, LPPD, DPA dan DPPA	100%	219,352,320	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Tersedianya Renstra, LKPJ, LPPD, DPA dan DPPA	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Berkondisi Baik	100 %	85,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Berkondisi Baik	100 %
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Gedung Dinkes	100%	85,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Gedung Dinkes	100%
2	Pengadaan Mobil Dinas / Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Mobil Dinas Yang diadakan	100%	-	Pengadaan Mobil Dinas / Operasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Mobil Dinas Yang diadakan	100%
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur		160,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan Formal	100%	75,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan Formal	100%
2	Penunjang Operasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM Puskesmas dan RS yang memahami tentang registrasi dan perizinan,	Dinkes, 20 Pusk, 4 RS (50 Org)	85,000,000	Penunjang Operasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM Puskesmas dan RS yang memahami tentang registrasi dan perizinan,	Dinkes, 20 Pusk, 4 RS (50 Org)

IV	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		Persentase Terpenuhi Kebutuhan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar		6,065,000,000	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		Persentase Terpenuhi Kebutuhan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar	
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Diadakan	2 Paket	5,600,000,000	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Diadakan	2 Paket
2	Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	20 Pusk	380,000,000	Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	20 Pusk
3	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)	Dinas Kesehatan	Lancarnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	85,000,000	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)	Dinas Kesehatan	Lancarnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	100%
V	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Visite Rate	2.46	4,924,815,000	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Visite Rate	2.46
1	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase Keluarga Kelompok Resiko Tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan Jaringannya termasuk pada Daerah Terpencil	80%	275,000,000	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase Keluarga Kelompok Resiko Tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan Jaringannya termasuk pada Daerah Terpencil	80%
2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk Posko-Posko Kesehatan dalam Rangka Hari Raya dan even-even Daerah	20 Pusk, 91 Pustu, 182 Poskesri dan 10 Posko kesehatan	769,815,000	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk Posko-Posko Kesehatan dalam Rangka Hari Raya dan even-even Daerah	20 Pusk, 91 Pustu, 182 Poskesri dan 10 Posko kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tersedianya Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	20 Puskesmas	3,750,000,000	Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tersedianya Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	20 Puskesmas
4	Pelayanan Kesehatan Pada Pengobatan Tradisional (BATRA)	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyehat tradisional yang dipantau dalam pelayanan kesehatan.	20 Puskesmas	85,000,000	Pelayanan Kesehatan Pada Pengobatan Tradisional (BATRA)	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyehat tradisional yang dipantau dalam pelayanan kesehatan.	20 Puskesmas
5	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan) (BOK)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	90%	45,000,000	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan) (BOK)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	90%
6	Sistem Penanggulangan Kewaspadaan	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	80%	-	Sistem Penanggulangan Kewaspadaan	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	80%

VI	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				20,000,000	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			
1	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Dinas Kesehatan	Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina	30 PIRT, 5 Apotik dan 5 Toko Obat	20,000,000	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Dinas Kesehatan	Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina	30 PIRT, 5 Apotik dan 5 Toko Obat
VII	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				168,168,960	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Dinas Kesehatan	Tersedianya Pembinaan dan Pelatihan Bimtek Aset dan Pengelolaan Aset	100%	168,168,960	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Dinas Kesehatan	Tersedianya Pembinaan dan Pelatihan Bimtek Aset dan Pengelolaan Aset	100%
VIII	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Nagari Siaga Aktif		1,875,000,000	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Persentase Nagari Siaga Aktif	
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Dinas Kesehatan	Persentase Kesiediaan Media Promosi	100%	500,000,000	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Dinas Kesehatan	Persentase Kesiediaan Media Promosi	100%
2	Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga	Dinas Kesehatan	Jumlah Nagari Siaga Aktif yang dibina	182 Nagari	500,000,000	Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga	Dinas Kesehatan	Jumlah Nagari Siaga Aktif yang dibina	182 Nagari
3	Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PSM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Posyandu Mandiri	432 Posy	750,000,000	Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PSM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Posyandu Mandiri	432 Posy
4	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten	Dinas Kesehatan	Jumlah Profil Dinas Kesehatan	30 Bh Profil Kesehatan	125,000,000	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten	Dinas Kesehatan	Jumlah Profil Dinas Kesehatan	30 Bh Profil Kesehatan
5	Germas	Dinas Kesehatan		20 Pusk	-	Germas	Dinas Kesehatan		20 Pusk
IX	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100%	371,300,000	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100%
1	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Dinas Kesehatan	Persentase Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Balita Kurang Gizi 60 Org/Bumil KEK 50	127,300,000	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Dinas Kesehatan	Persentase Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Balita Kurang Gizi 60 Org/Bumil KEK 50

2	Pemantauan Status Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Terpantaunya Status Gizi dan Validasi Data, Pemantauan Garam Beryodium dan Pelacakan Gizi Buruk	85%	122,500,000	Pemantauan Status Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Terpantaunya Status Gizi dan Validasi Data, Pemantauan Garam Beryodium dan Pelacakan Gizi Buruk	85%
3	Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Terlatihnya dan termonitornya program perbaikan gizi	85%	121,500,000	Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Terlatihnya dan termonitornya program perbaikan gizi	85%
X	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT		Jumlah Nagari ODF (Open Defecation Free)		1,159,740,400	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT		Jumlah Nagari ODF (Open Defecation Free)	
1	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Pengawasan, Pembinaan, Sanitasi Dasar, TTU dan TPM	20 Puskesmas	364,654,200	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Pengawasan, Pembinaan, Sanitasi Dasar, TTU dan TPM	20 Puskesmas
2	Pendamping PAMSIMAS	Dinas Kesehatan	Pemantauan dan Pembinaan Lokasi Paska PAMSIMAS	20 Puskesmas	94,413,200	Pendamping PAMSIMAS	Dinas Kesehatan	Pemantauan dan Pembinaan Lokasi Paska PAMSIMAS	20 Puskesmas
3	Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sehat yang dipantau dan dibina	9000 Rumah	75,740,300	Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sehat yang dipantau dan dibina	9000 Rumah
5	Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Depot yang diperiksa	200 Depot	223,772,600	Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Depot yang diperiksa	200 Depot
6	Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Forum Kabupaten sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan, serta Kelompok Kerja Nagari yang dibina	1 Forum Kab, 15 Forum Kec, dan 182	141,160,100	Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Forum Kabupaten sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan, serta Kelompok Kerja Nagari yang dibina	1 Forum Kab, 15 Forum Kec, dan 182
7	Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah UKK dan Kelompok Olah Raga yang dibina	20 Puskesmas	260,000,000	Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah UKK dan Kelompok Olah Raga yang dibina	20 Puskesmas
XI	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR		Succes Rate TB	90%	1,805,000,000	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR		Succes Rate TB	90%
1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyemprotan Sarang Nyamuk	60 Focus	325,000,000	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyemprotan Sarang Nyamuk	60 Focus
2	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyakit menular yang ditanggulangi	11 Jenis	325,000,000	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyakit menular yang ditanggulangi	11 Jenis

3	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelayanan dan Pencegahan Penyakit Infeksi dan Menular (Endemik) di Kab. Pesisir Selatan	95%	390,000,000	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelayanan dan Pencegahan Penyakit Infeksi dan Menular (Endemik) di Kab. Pesisir Selatan	95%
4	Peningkatan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan Imunisasi	90%	450,000,000	Peningkatan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan Imunisasi	90%
5	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Surveilans Lengkap dan Tepat Waktu	90%	95,000,000	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Surveilans Lengkap dan Tepat Waktu	90%
6	Sistem Kewaspadaan Dini KLB/Wabah dan Bencana	Dinas Kesehatan	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang di Respon	90%	90,000,000	Sistem Kewaspadaan Dini KLB/Wabah dan Bencana	Dinas Kesehatan	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang di Respon	90%
7	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB	Dinas Kesehatan	Persentase Kejadian Luar Biasa dan Bencana yang ditangani	100%	130,000,000	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB	Dinas Kesehatan	Persentase Kejadian Luar Biasa dan Bencana yang ditangani	100%
XII	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN		Persentase Fasyankes Terakreditasi	100 %	1,209,000,000	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN		Persentase Fasyankes Terakreditasi	100 %
1	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Adanya Izin Operasional Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan di Kab. Pesisir Selatan	2 Klinik 6 Pusk	725,000,000	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Adanya Izin Operasional Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan di Kab. Pesisir Selatan	2 Klinik 6 Pusk
2	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Kab. Pesisir	5 Pusk 15 Pusk	150,000,000	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Kab. Pesisir	5 Pusk 15 Pusk
3	Pembinaan dan Evaluasi Monitoring dr/drg/bidan PTT	Dinas Kesehatan	Jumlah dr/drg/bidan PTT yang dibina	20 Pusk	85,000,000	Pembinaan dan Evaluasi Monitoring dr/drg/bidan PTT	Dinas Kesehatan	Jumlah dr/drg/bidan PTT yang dibina	20 Pusk
4	Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga fungsional puskesmas dan rumah sakit yang dibina	20 Pusk	105,000,000	Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga fungsional puskesmas dan rumah sakit yang dibina	20 Pusk
5	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan peningkatan kinerja	20 Pusk	144,000,000	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan peningkatan kinerja	20 Pusk

XIII	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU JARINGANNYA		Persentase Puskesmas dan Pustu yang Memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	70%	20,050,000,000	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU JARINGANNYA	70%	Persentase Puskesmas dan Pustu yang Memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	
1	Pengadaan Puskesmas Keliling	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	100%	400,000,000	Pengadaan Puskesmas Keliling	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	100%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas-puskesmas	5 Pusk	3,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas-puskesmas	5 Pusk
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan	100%	6,500,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan	100%
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)	Dinas Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Representatif	100%	1,750,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)	Dinas Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Representatif	100%
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)	Dinas Kesehatan	Tersedia Dana Untuk Operasional Penunjang Kegiatan	100%	700,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)	Dinas Kesehatan	Tersedia Dana Untuk Operasional Penunjang Kegiatan	100%
6	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	Dinas Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Gigi di Puskesmas	100%	2,000,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	Dinas Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Gigi di Puskesmas	100%
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Perbaikan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	100%	300,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Perbaikan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	100%
8	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Dinas Kesehatan	Tersedianya IPAL Untuk Puskesmas	100%	5,400,000,000	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Dinas Kesehatan	Tersedianya IPAL Untuk Puskesmas	100%
XIV	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA		Persentase Bangunan dan alat kesehatan Rumah Sakit yang memenuhi standar	80%	22,000,000,000	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA		Persentase Bangunan dan alat kesehatan Rumah Sakit yang memenuhi standar	80%

1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Rumah Sakit Tapa	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	12,000,000,000	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Rumah Sakit Tapa	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	100%
2	Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK)	Rumah Sakit Tapa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	10,000,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK)	Rumah Sakit Tapa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%
XV	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN				32,055,000,000	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN			
1	Kemitraan Asuransi Kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Pembayaran Premi Asuransi untuk Jamkesda	100%	7,000,000,000	Kemitraan Asuransi Kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Pembayaran Premi Asuransi untuk Jamkesda	100%
2	Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien Gratis	100%	675,000,000	Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien Gratis	100%
3	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Puskesmas	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien JKN,	100%	22,000,000,000	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional	Puskesmas	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien JKN,	100%
	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) JKN di Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Tapan	Terjaminnya Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat	100%	100,000,000	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) JKN di Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Tapan	Terjaminnya Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat	100%
4	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Puskesmas	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien JKN yang Dirujuk, Rawatan,	100%	2,280,000,000	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Puskesmas	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien JKN yang Dirujuk, Rawatan,	100%
XVI	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LANSIA		Persentase Lansia yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	80 %	80,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LANSIA		Persentase Lansia yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	80 %
1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kesakitan Pada Lansia	80%	80,000,000	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kesakitan Pada Lansia	80%
XVII	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK		Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	22 / 1000 KH	3,990,900,500	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK		Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	22 / 1000 KH
1	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	22 / 1000 KH	650,900,500	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	22 / 1000 KH
2	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (Prasekdam Usek)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Kelompok Anak Sekolah UKS dan UKGS dan Peduli Remaja	100%	90,000,000	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (Prasekdam Usek)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Kelompok Anak Sekolah UKS dan UKGS dan Peduli Remaja	100%
3	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (jampersal) DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui	22 / 1000 KH	3,250,000,000	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (jampersal) DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui	22 / 1000 KH

XVIII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR		Persentase Nagari dengan Posbindu PTM	50%	675,000,000	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR		Persentase Nagari dengan Posbindu PTM	50%
1	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak menular	9 Jenis	200,000,000	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak menular	9 Jenis
2	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok	Dinas Kesehatan	Jumlah Pencegahan dan pengendalian Penyakit akibat rokok dan deteksi dini	9 Jenis	250,000,000	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok	Dinas Kesehatan	Jumlah Pencegahan dan pengendalian Penyakit akibat rokok dan deteksi dini	9 Jenis
3	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Matra	20 Puskesmas	115,000,000	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Matra	20 Puskesmas
4	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah ODGJ yang dipasung yang dilayani	30 orang	110,000,000	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah ODGJ yang dilayani	30 orang
XIV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT			100%	16,500,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT			100%
1	Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan	Rumah Sakit Tapan	Pembayaran honorarium pelaksanaan dan insentif jasa medis paramedis tenaga PNS / NON PNS, terlaksananya operasional RSUD, terlaksananya pengadaan di RSUD	100%	16,500,000,000	Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan	Rumah Sakit Tapan	Pembayaran honorarium pelaksanaan dan insentif jasa medis paramedis tenaga PNS / NON PNS, terlaksananya operasional RSUD, terlaksananya pengadaan di RSUD	100%
	JUMLAH				116,297,296,700				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak terlepas dari penetapan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan bidang kesehatan yaitu “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat serta sesuai dengan kesepakatan **Sustainable Development Goals (SDGs)** bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran SDGs 2015”. Arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
2. Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Penyelidikan Epidemiologi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa / KLB melalui deteksi dini KLB;
3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, fokus prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan bidang kesehatan didukung oleh pelaksanaan strategi pembangunan kesehatan yaitu upaya peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan termasuk penyediaan vaksin, penyediaan sumberdaya kesehatan, penyediaan peralatan kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui strategi pembangunan kesehatan, melalui beberapa strategi pembangunan kesehatan, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan;
- b. Pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah;
- c. Penguatan peraturan perundang undangan pembangunan kesehatan;
- d. Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi komprehensif dan pengembangan jejaring;

- e. Pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat;
- f. Peningkatan penapisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang *cost effective*;
- g. Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif;
- h. Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran hasil;
- i. Peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk indikator SPM dan *Universal coverage*;
- j. Penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan;
- k. Pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta;
- l. Peningkatan efektivitas dan efisien penggunaan anggaran;
- m. Peningkatan biaya operasional Puskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- n. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola upaya kesehatan yang baik (*good governance*);
- o. Peningkatan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
- p. Peningkatan manajemen kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- q. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pelatihan tenaga kesehatan;
- r. Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- s. Peningkatan pemantauan surveillance gizi;
- t. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk UKBM;
- u. Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti jaminan kesehatan masyarakat (JKN) melalui BPJS

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Tahun 2020

Penetapan tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan kesehatan dalam rencana kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan untuk Tahun 2020 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang kesehatan dengan:

- a. Meningkatkan Umur Harapan Hidup dari 70,4 tahun menjadi 70,6 tahun;
- b. Menurunnya angka kematian ibu maternal (AKI) dari 94/100.000 KH menjadi 92/100.000 KH;
- c. Menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 22/1.000 KH menjadi 21/1.000 KH;

2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

- a. Persentase Kepuasan Masyarakat meningkat dari 65% menjadi 70%.

3. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat

- a. Persentase Nagari Ber-PHBS meningkat dari 75% di tahun 2019 menjadi 80% pada tahun 2020

4. Meningkatnya Status Gizi pada Balita

- a. Persentase balita stunting, terjadi penurunan yaitu 16% dari tahun 2019 menjadi 15 % pada tahun 2020

5. Menurunnya Prevalensi Penyakit

- a. CDR TB Paru terjadi peningkatan sebesar 65% pada tahun 2019 menjadi 65% pada tahun 2020.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”* maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dan pelayanan administrasi termasuk kegiatan perencanaan dan pelaporan SKPD Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas yang ada (administrasi keuangan, perencanaan dan aset) dalam rangka mempercepat kelancaran administrasi dan

pelayanan kantor di Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 2.761.275.732,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk rehab gedung kantor Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan. Anggaran untuk pelaksanaan program ini direncanakan Rp. 55.000.000,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui keikutsertaan pelatihan-pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh instansi vertikal ataupun instansi/unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran program ini direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- dengan indikator kinerjanya: terikutinya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SDM kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas sebanyak 10 orang atau 100%.

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar (PKD) masyarakat di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poskesri) serta meningkatkan pemerataan dan ketersediaan obat-obatan pada masyarakat. Program ini direncanakan mempunyai alokasi anggaran Rp. 5.650.000.000,- yang bersumber dari DAK dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kegiatannya yaitu:

- a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, dengan indikator kinerjanya tersedianya obat PKD dan bahan laboratorium serta perbekalan kesehatan pada 18 Puskesmas atau 80%;
- b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, dengan indikator kinerjanya tersedianya kebutuhan obat-obatan PKD dan bahan laboratorium dan pendistribusiannya ke 18 Puskesmas atau 70%;

- c. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 60%.

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); kunjungan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) untuk kelompok resiko tinggi (Resti); cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan program UKGS/UKGM, pelayanan kesehatan masyarakat oleh dokter spesialis melalui kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas.

Program ini juga bertujuan untuk memberikan insentif/jasa kepada tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Rawatan dan Non Rawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di IGD, Posko Kesehatan pada hari-hari libur baik di Puskesmas, Pantai Carocok dan Posko lainnya. Serta meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah terpencil yaitu 6 daerah terpencil yaitu nagari Langgai, Sungai Baringin, Labuhan Baruak Kecamatan Batang Kapas, Nagari Pasir Ganting Kecamatan Air Pura, Nagari Sungai Nyalo, Sungai Pinang dan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan. Rencana alokasi anggaran program ini adalah Rp. 3.245.000.000,- yang bersumber dari DAK (BOK) dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan kegiatan dan indikator kinerjanya yaitu:

- a. Pembinaan perencanaan dan penilaian kinerja tingkat Puskesmas (P1, P2 dan P3) dengan indikator kinerjanya tersedianya kebutuhan perencanaan dan penilaian kinerja petugas Puskesmas (PTP) dalam rangka peningkatan manajemen Puskesmas pada 18 Puskesmas atau 100%;
- b. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerjanya :
 - Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan kesehatan kelompok Resti, UKGS dan UKGM pada 18 Puskesmas atau 82,50%;
 - Terlaksananya pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis di Puskesmas atau 100 %;
- c. Peningkatan kesehatan masyarakat dengan indikatornya :
 - Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (PHN, Batra, P3K, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata, Kesehatan Olahraga) pada 18 Puskesmas atau 82,50%
 - Terlaksananya kesehatan masyarakat di 6 daerah terpencil atau 82,50%

- Terlaksananya pelayanan dan perawatan kesehatan masyarakat di 10 Puskesmas Rawat Inap, 8 Puskesmas Non Rawat Inap dan UGD Puskesmas atau 82,50%
- d. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan/BOK) pada 18 Puskesmas atau 100%.

6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kader posyandu dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli kesehatan serta penyediaan data dan informasi kesehatan. Rencana Alokasi anggaran untuk program ini bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Rp. 2.285.616.000,- yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan indikator kinerjanya yaitu terpenuhinya kebutuhan pengembangan media promosi kesehatan seperti: leaflet, spanduk, poster, baliho dan media promosi kesehatan lainnya) pada 18 Puskesmas atau dengan target 100%;
- b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, dengan indikator kinerjanya yaitu terpenuhinya kebutuhan penyuluhan kesehatan pada masyarakat baik secara penyuluhan individu maupun kelompok dan masyarakat pada 18 Puskesmas dengan target capaian 100%;
- c. Usaha Kesehatan Institusi (UKI) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) dengan indikator kinerjanya yaitu tersedianya:
 - Bantuan transport kader posyandu pada 654 posyandu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan target capaian 80%;
 - Bantuan PMT pada 654 posyandu dengan target capaiannya 80%;
 - Bantuan penyediaan bahan ATK untuk operasional posyandu pada 654 posyandu dengan target capaian 80%;
- d. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) melalui Pembentukan dan Pembinaan nagari Siaga dengan indikator kinerjanya terbentuk dan terbinanya UKBM di 15 Kecamatan (Nagari siaga dan Posyandu aktif) dengan target capaian kinerjanya 95%;
- e. Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) dengan indikator kinerjanya yaitu tersedianya sistem pengelolaan data dan profil kesehatan serta pengembangan

informasi teknologi (IT) dan jaringannya serta tersedianya buku profil kesehatan pada 18 Puskesmas dengan target capaian kinerja 83%.

7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan cakupan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam rangka menurunkan prevalensi masalah gizi masyarakat. Rencana alokasi anggaran program ini adalah Rp. 351.200.000,- dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kegiatan-kegiatan pada program ini adalah:

- a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin (PMT) dengan indikator kinerjanya, yaitu:
 - Terpenuhiya kebutuhan pemenuhan asupan gizi dalam rangka penurunan prevalensi gizi buruk, ibu hamil yang KEK dan anemia pada 15 kecamatan dan 18 Puskesmas dengan target capaian 100%;
 - Tersedianya PMT balita gizi buruk pada anak balita sebanyak 55 kasus;
 - Tersedianya PMT bagi ibu hamil anemia dan KEK pada 70 kasus;
 - Pemberian Tablet Tambah Darah pada anemia gizi besi dengan target capaian 85%
 - Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita dengan target capaian 100%
 - Pemberian Kapsul Vitamin A pada Ibu Nifas dengan target capaian 100%
 - Bayi mendapatkan ASI Eksklusif dengan target capaian 47%
- b. Pemantauan Status Gizi Masyarakat (PSG) dengan indikator kinerjanya, yaitu:
 - Persentase cakupan Pemantauan Status Gizi dengan target capaian 100%
 - Rumah Tangga menggunakan garam beryodium dengan target capaian 90%
 - Terlaksananya pelacakan kasus Gizi Buruk, Balita Kurang Gizi dan Balita BGM dengan target capaian 100%
 - Tersedianya PMT pada Balita Gizi Buruk yang dirawat pada TFC dengan target capaian 100%
 - Persentase Balita di timbang Berat Badannya setiap bulan dengan target capaian 90%
 - Terlaksananya Tata Laksana Gizi Buruk pada tingkat rumah tangga dengan target capaian 95%

- c. Pemantauan dan monitoring (Monev) Program Gizi Masyarakat dengan indikator kinerjanya, yaitu meningkatnya cakupan program gizi masyarakat pada 18 Puskesmas dengan target capaian kinerja 90%.

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penyakit infeksi dan menular akibat buruknya kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat dengan rencana alokasi anggaran Rp. 3.107.359.109,- yang bersumber dari DAK (IPAL) dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, dengan uraian kegiatannya:

- a. Pengakajian pengembangan lingkungan sehat, dengan indikator kinerjanya meningkatnya cakupan kualitas sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat, yaitu:
- Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas di 15 kecamatan dengan target 70%;
 - Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan dengan target 100%
 - Cakupan penduduk yang menggunakan jamban dan SPAL yang memenuhi syarat kesehatan di 15 kecamatan dengan target 78%;
 - Cakupan penduduk stop BABS dengan target 100%;
 - Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan dengan target 89%;
 - Cakupan rumah penduduk yang memenuhi syarat kesehatan dengan target 88%;
 - Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan dengan target 81%;
 - Pembangunan Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan target 100%
- b. Pendamping PAMSIMAS, dengan indikator kinerjanya yaitu terlaksananya kegiatan pendampingan PAMSIMAS di 15 kecamatan dengan target 95%;
- c. Penunjang Program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan indikator kinerjanya terlaksananya pembinaan PPSP bagi masyarakat di 15 kecamatan dengan target capaian kinerja 95%;
- d. Pengelolaan dan pengembangan pemeriksaan sanitasi dasar masyarakat dengan indikator kinerjanya yaitu terlaksananya pemeriksaan sampel sumber air minum secara fisik dan bakteriologis pada 15 kecamatan dengan target 100%.
- e. Pelaksanaan forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat dengan target 100%

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita penyakit infeksi dan menular bagi masyarakat serta karena dampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit, yaitu prevalensi penderita penyakit DBD, Malaria, TB Paru, ISPA, Diare, Kusta, Filariasis dan penyakit infeksi dan menular lainnya dengan rencana alokasi anggaran untuk program ini yaitu Rp. 1.300.596.000,- dengan sumber pendanaan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk yaitu DBD, Malaria, dsb. Indikator kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan penyemprotan (fogging) terhadap sarang-sarang nyamuk pada lingkungan perumahan masyarakat sebanyak 100 foccus serta menurunkan indeks kasus Malaria (API) menjadi 2 dengan target capaian kinerja 100 %;
- b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan indikator kinerjanya terlaksananya pelacakan kasus dan penurunan prevalensi penyakit infeksi dan menular pada masyarakat dengan:
 - Meningkatnya succes rate Malaria, DBD, TB Paru dan Rabies dengan target 100%;
 - Meningkatnya angka kesembuhan penderita TB Paru dan penemuan kasus (CDR) dengan target capaian 95%;
 - Terkendalinya prevalensi penderita HIV/AIDS pada poluasi dewasa dengan target 0,2%;
 - Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat gigitan hewan rabies dengan target kinerja 90%;
 - Menurunnya angka kesakitan penyakit diare, ISPA, DBD, AFP, Campak, TN dan P3DI dengan target 95%.
- c. Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemic dengan indikator kinerjanya terbebasnya masyarakat dari ancaman KLB dan wabah penyakit kaki gajah (Filariasis), Kusta, Frambusia dsb, pada 15 kecamatan dengan target 90%;
 - Peningkatan imunisasi dengan indikator kinerjanya yaitu:Terlaksananya pelayanan imunisasi dasar bagi bayi dan ibu hamil serta anak sekolah (SD)

pada 20 puskesmas, 542 SD dan 33.645 siswa dengan target capaian kinerja 95%;

- Meningkatnya cakupan Nagari UCI imunisasi dengan target capaian kinerja 90% pada 662 desa yang ada;
- Tersedianya vaksin anti rabies (VAR) sebanyak 100 keur atau 100 %;
- Tersedianya peralatan imunisasi rutin di 18 Puskesmas yang ada atau target 100%.

- d. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah dengan indikator kinerjanya yaitu teridentifikasinya penyakit-penyakit infeksi dan menular melalui surveillance penyakit menular dan wabah pada 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan target 95%;
- e. Sistem kewaspadaan dini terhadap KLB/wabah dan bencana dengan indikator kinerjanya yaitu terlaksananya pengelolaan dan manajemen sistem kewaspadaan dini terhadap KLB dan wabah serta bencana alam pada 15 kecamatan dengan target 95 %;
- f. Pemantauan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan indikator kinerjanya yaitu terlaksananya pemantauan dan pengamatan penyakit dalam rangka penanggulangan dampak masalah kesehatan akibat bencana alam dan KLB/wabah penyakit di 15 kecamatan dengan target 100%.

4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem standarisasi pelayanan kesehatan termasuk standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas serta meningkatkan pembinaan dan pengelolaan tenaga fungsional kesehatan termasuk paya peningkatan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas. Alokasi anggaran untuk program ini direncanakan selama tahun 2017 adalah Rp. 966.536.860,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini memiliki beberapa kegiatan disertai dengan indikator kinerjanya yaitu:

- a. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi kesehatan dengan indikator kinerjanya yaitu terlaksananya sistem akreditasi sarana pelayanan kesehatan di 18 Puskesmas dan

mencakup registrasinya dan sistem sertifikasi pelayanan kesehatan dengan target capaian kinerja 80%;

- b. Pembinaan dan evaluasi serta monitoring tenaga kesehatan PTT (dokter umum, dokter gigi dan Bidan) dengan indikatornya terlaksananya sistem pembinaan dan monitoring dan evaluasi kinerja dari tenaga pelayanan kesehatan PTT di 18 Puskesmas dengan target capaian kinerja 100%;
- c. Upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kesehatan dengan indikator kinerjanya terlaksananya pembinaan tenaga kesehatan dan penilaian puskesmas berprestasi terhadap 18 puskesmas yang ada dengan target 75%;
- d. Pengelolaan dan pembinaan tenaga fungsional dengan indikatornya yaitu terselenggaranya pembinaan tenaga fungsional kesehatan di 18 puskesmas, Pustu dan Poskesri dengan target capaian kinerjanya 100%.

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Jaringannya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Program ini didukung dengan rencana anggaran Rp. 64.200.000.000,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun 2017. Adapun uraian kegiatannya adalah:

- a. Pengadaan Puskesmas Keliling (Ambulans) dan Mobil Operasional Pelayanan Daerah Terpencil sebanyak 3 (tiga) unit, dengan sumber dana APBN Pusat;
- b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas dengan indikator kinerja yaitu terlaksananya pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebanyak 6 unit.
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dengan indikator yaitu terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya sebanyak 15 unit yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan indikator kinerjanya yaitu tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit sebanyak 1 unit di Kecamatan Lengayang.

6. Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengobatan dasar masyarakat dan meningkatkan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui askes sosial (PNS), JAMKESDA, Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS (Program Jaminan Kesehatan Nasional).

Program ini direncanakan didukung dengan anggaran Rp.27.070.000.000,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan dana kapitasi dan non kapitasi BPJS Tahun 2017, dengan uraian kegiatan beserta indikator kinerjanya:

- a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dengan indikator kinerjanya terpenuhinya kebutuhan jaminan pemeliharaan pelayanan kesehatan penduduk dan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerjanya 85%;
- b. Pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Kapitasi dan non kapitasi) di Puskesmas dengan indikator kinerjanya tersedianya insentif/jasa pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya pada 18 Puskesmas serta tersedianya pembiayaan dalam rangka pembelian dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung administrasi kegiatan serta tersedianya peralatan kesehatan termasuk bahan medis habis pakai (BMHP) dengan target kinerja 100%;
- c. Pelayanan kesehatan masyarakat gratis di Puskesmas dan jaringannya dengan indikator kinerjanya yaitu terlayannya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 18 Puskesmas dengan target capaian kinerja 80%.

7. Program Peningkatan Kesehatan Lansia

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan kelompok usia lanjut (kelompok usia 54 tahun keatas) dengan meningkatkan pelayanan kesehatan para lansia dengan rencana alokasi alokasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 yaitu Rp. 70.000.000,- dengan uraian kegiatannya yaitu pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia. Adapun indikator kinerjanya adalah meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan kelompok lanjut usia di 18 Puskesmas dan khususnya 2 puskesmas santun lansia dan terbinanya posyandu lansia di 18 Puskesmas dengan target capaian kinerjanya 82,50%.

8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah dan angka kematian ibu maternal, bayi dan anak balita (AKI dan AKB) dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) serta meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak di sarana pelayanan kesehatan. Program ini didukung dengan rencana anggaran Rp. 670.450.000,- Adapun uraian kegiatannya adalah:

a. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan indikator kinerjanya yaitu meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam rangka menurunkan angka kematian ibu maternal (AKI) dan angka kematian bayi serta anak balita (AKB) dengan indikator kinerjanya yaitu:

- Jumlah Puskesmas yang mampu PONE dengan target capaian kinerjanya yaitu 10 Puskesmas rawatan atau 85%;
- Meningkatnya cakupan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak usia prasekolah yang dilakukan deteksi dini tumbuh kembang di Posyandu atau Puskesmas (DIDTK) pada 18 Puskesmas dengan target 90%;
- Meningkatnya cakupan MTBM dan MTBS di 18 Puskesmas dengan target 90%;
- Meningkatnya cakupan Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu di 18 Puskesmas dengan target capaian kinerjanya 90%;
- Meningkatnya cakupan audit maternal perinatal (AMP) di 18 Puskesmas dengan target 85%;
- Meningkatnya cakupan penanganan komplikasi ibu hamil risiko tinggi (risti) dan neonatus risti pada 18 Puskesmas dengan target 90%;
- Meningkatnya cakupan kunjungan neonatus, bayi dan anak balita di 18 Puskesmas dengan target 90%;
- Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) pada 18 Puskesmas dengan target 95%.
- Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif dengan target 75%
- Meningkatnya cakupan Program KIA dan KB dan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dilapangan dengan target 90%

b. Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah dengan indikator kinerjanya yaitu terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan usia pra sekolah pada 18 Puskesmas dengan target capaian kinerjanya 95%

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita akibat penyakit tidak menular (PTM) dan penanggulangan penyakit seperti penyakit Hipertensi, DM, Jantung, penyakit akibat dampak dari konsumsi rokok dan sebagainya melalui kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan penanggulangan kondisi pasien dengan kecelakaan. Rencana alokasi anggaran bersumber dari APBD kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 yaitu Rp. 225.000.000,- dengan kegiatannya yaitu pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM). Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian dan pencegahan penderita penyakit tidak menular termasuk pelayanan kesehatan matra di 18 Puskesmas Adapun uraian kegiatannya adalah:

- a. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan indikator kinerjanya yaitu Menurunkan angka kematian dan angka keesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) dengan target capaian kinerjanya 20%
- b. Pemantuan dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tradisional (Matra) dengan indikator kinerjanya Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra (Korban Bencana, Kecelakaan, Jemaah Haji dan lain-lain) dengan target capaian kinerjanya 35%

TABEL 3.2									
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020									
KABUPATEN PESISIR SELATAN									
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	Dinkes dan Pusk	100%	2,607,118,617			2,896,539,610	
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas	Kebutuhan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi (%)	Dinkes dan Pusk	Dinkes & 20 Pusk	335,940,000			369,534,000	
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan (%)	Dinkes dan Pusk	Dinkes & 20 Pusk	400,000,000			616,301,865	
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kebutuhan Administrasi Keuangan (%)	Dinkes dan Pusk	100%	190,000,000			230,255,162	
08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor (%)	Dinkes	100%	458,259,724			554,494,266	
09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (%)	Dinkes	100%	15,000,000			22,264,000	
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)	Dinkes	100%	27,631,620			33,434,260	
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (%)	Dinkes	100%	27,450,685			33,215,329	
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Penerangan Kantor (%)	Dinkes	100%	20,000,000			34,655,913	
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	100%	500,000,000			220,000,000	
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Pembayaran Langganan Koran	Dinkes dan Pusk	100%	13,900,000			15,290,000	
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat Dinkes yang dilaksanakan dan Makan Minum Tamu Dinkes dan Puskesmas	Dinkes dan Pusk	100%	90,000,000			123,550,068	
18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Dinkes	100%	147,936,588			79,981,000	
19.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Persentase Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dinkes	100%	60,000,000			74,899,000	
21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Dinkes	100%	221,000,000			427,190,000	
30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Renstra, LKPJ, LPPD, DPA dan DPPA	Dinkes	100%	100,000,000			61,474,748	
02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Berkondisi Baik		100%	800,000,000			360,500,000	
22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Gedung Dinkes	Dinkes	100%	500,000,000			60,500,000	
	Pengadaan Mobil Dinas / Operasional	Jumlah Mobil Dinas Yang diadakan	Dinkes	100%	300,000,000			300,000,000	

05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur		100%	105,965,920			135,868,763	
01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan Formal	Dinkes	100%	35,000,000			50,000,000	
16.	Penunjang Operasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan	Jumlah SDM Puskesmas dan RS yang memahami tentang registrasi dan perizinan,	Dinkes	Dinkes, 20 Pusk, 4 RS (50 Org)	70,965,920			85,868,763	
15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan Dasar		95%	4,482,349,000			41,270,000,000	
01.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah Paket Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Diadakan	20 Puskesmas	2 Paket	4,252,349,000		90%	5,600,000,000	
02.	Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	20 Puskesmas	20 Pusk	200,000,000		90%	400,000,000	
07.	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)	Lancarnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Dinkes	100%	30,000,000		100%	40,000,000	
16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Visite Rate	20 Puskesmas	95%	13,642,382,217			17,865,000,000	
02.	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Persentase Keluarga Kelompok Resiko Tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan Jaringannya termasuk pada Daerah Terpencil	Pesisir Selatan	800 KK	150,000,000		87.50%	400,000,000	
09.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk Posko-Posko Kesehatan dalam Rangka Hari Raya dan even-even Daerah	Pesisir Selatan	20 Pusk, 91 Pustu, 182 Poskesri dan 10 Posko kesehatan	1,714,157,217		100%	1,815,000,000	
15.	Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	Pesisir Selatan	20 Puskesmas	60,000,000		87.50%	75,000,000	
16.	Pelayanan Kesehatan Pada Pengobatan Tradisional (BATRA)	Jumlah Penyehat tradisional yang dipantau dalam pelayanan kesehatan.	Pesisir Selatan	20 Puskesmas	30,000,000		87.50%	75,000,000	
17.	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan) (BOK)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat			11,288,225,000			15,000,000,000	
	Sistem Penanggulangan Kewaspadaan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat			400,000,000			500,000,000	
17.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				40,000,000			200,000,000	
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina	15 Kecamatan	30 PIRT, 5 Apotik dan 5 Toko Obat	40,000,000		70%	200,000,000	
17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				111,190,204			122,309,225	
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tersedianya Pembinaan dan Pelatihan Binte Aset dan Pengelolaan Aset	Dinas Kesehatan		111,190,204			122,309,225	

19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Nagari Siaga Aktif	Kab. Pessel	100%	610,000,000			2,282,841,817	
01.	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Persentase Kesiadaan Media Promosi	20 Pusk	100%	190,000,000		100%	600,000,000	
06.	Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga	- Jumlah Nagari Siaga Aktif yang dibina - Jumlah Stratifikasi Nagari Siaga Mandiri	20 Pusk	182 Nagari	90,000,000		90%	600,000,000	
07.	Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PSM)	Jumlah Posyandu Mandiri	20 Pusk	432 Posy 20 Pusk	110,000,000		75%	850,000,000	
08.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten	Jumlah Profil Kesehatan	Kab. Pessel	1 Dinkes dan 20 Pusk	120,000,000			132,841,817	
	Germas		Kab. Pessel	1 Dinkes dan 20 Pusk	100,000,000			100,000,000	
20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan			550,000,000			420,000,000	
02.	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Persentase Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	20 Pusk	Balita Kurang Gizi 60 Org/Bumil KEK 50 Org	350,000,000		Balita Kurang Gizi 70 Org/Bumil KEK 65 Org	161,000,000	
08.	Pemantauan Status Gizi Masyarakat	Terpantaunya Status Gizi dan Validasi Data, Pemantauan Garam Beryodium dan Pelacakan Gizi Buruk	20 Pusk	85%	100,000,000		85%	129,500,000	
09.	Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat	Terlatihnya dan termonitornya program perbaikan gizi	20 Pusk	85%	100,000,000		85%	129,500,000	
21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Jumlah Nagari ODF (Open Defecation Free)			905,000,000			1,014,995,049	
01.	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	- Jumlah Pengawasan, Pembinaan, Sanitasi Dasar, TTU dan TPM - Jumlah Wirausaha Sanitasi dan Hygiene Sanitasi Tempat - Jumlah dokumen UKL/UPL	Kab. Pessel	20 Puskesmas 40 Org 4 Dok	400,000,000		100%	555,917,943	
07.	Pendamping PAMSIMAS	- Pemantauan dan Pembinaan Lokasi Paska PAMSIMAS - Jumlah Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Lokasi Pamsimas Dinkes	20 Pusk 40 Org	40,000,000		100%	52,054,152	
08.	Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	- Jumlah Rumah Sehat yang dipantau dan dibina - Jumlah Pertemuan Petugas sanitasi Limbah Medis Puskesmas	Kab. Pessel 20 Pusk	9000 Rumah 40 Org 40 TPM	25,000,000		100%	34,307,655	
09.	Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat	- Jumlah Depot yang diperiksa - Jumlah Pelatihan Hygiene Sanitasi Pengelolaan DAM - Jumlah Reagen Kimia dan Bakteriologis Pemeriksaan Sampel	Kab. Pessel Dinkes Dinkes	200 Depot 150 Org 10 Parameter	80,000,000		85%	140,765,809	
10.	Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat	Jumlah Forum Kabupaten sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan, serta Kelompok Kerja Nagari yang dibina	15 Kec	1 Forum Kab, 15 Forum Kec, dan 182 Pokja Nagari	300,000,000		100%	189,259,986	
11.	Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Jumlah Kelompok UKK yang dibina	20 Pusk	20 Pusk	60,000,000		100%	42,689,504	
		Jumlah Pertemuan Kesehatan Olahraga							

22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Succes Rate TB	Kab. Pessel	100%	723,000,000			1,314,400,340	
01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Jumlah Penyemprotan Sarang Nyamuk	Kab. Pessel	60 Focus	150,000,000		100%	315,051,505	
05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Penyakit menular yang ditanggulangi	Kab. Pessel	11 Jenis	167,000,000		100%	314,336,826	
06	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	- Jumlah Pelayanan dan Pencegahan Penyakit Infeksi dan Menular (Endemik) di Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pessel	95%	40,000,000		100%	72,743,055	
08	Peningkatan Imunisasi	Persentase Pelayanan Imunisasi	Kab. Pessel	90%	150,000,000		100%	247,268,954	
09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	- Jumlah Laporan Surveilans Lengkap dan Tepat Waktu - Jumlah Bulletin Epidemiologi Kab. Pesisir Selatan (2 Edisi)	20 Pusk	90%	75,000,000		90%	110,000,000	
12	Sistem Kewaspadaan Dini KLB/Wabah dan Bencana	- Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang di Respon - Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kewaspadaan Dini KLB/Wabah dan Bencana	20 Pusk	90%	66,000,000		90%	105,000,000	
14	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB	Persentase Kejadian Luar Biasa dan Bencana yang ditangani	Kab. Pessel	100%	75,000,000		90%	150,000,000	
23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan			2,009,000,000			2,180,000,000	
07	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan	Adanya Izin Operasional Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan di Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pessel	2 Klinik 6 Pusk	200,000,000		2 Puskesmas	350,000,000	
08	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAK Non Fisik)	- Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Kab. Pessl - Terlaksananya Pembinaan Pasca Akreditasi	Kab. Pessel	5 Pusk 15 Pusk	1,624,000,000		9 Pusk 11 Pusk	1,600,000,000	
09	Pembinaan dan Evaluasi Monitoring dr/drg/bidan PTT	Jumlah dr/drg/bidan PTT yang dibina	20 Pusk	20 Pusk	40,000,000			65,000,000	
10	Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional	Jumlah tenaga fungsional puskesmas dan rumah sakit yang	20 Pusk	20 Pusk	45,000,000			65,000,000	
11	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan peningkatan kinerja	20 Pusk	20 Pusk	100,000,000		20 Pusk	100,000,000	
12	Akreditasi Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	1 RSUD		-			1,000,000,000	
25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU JARINGANNYA	Persentase Puskesmas dan Pustu yang Memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	100%		13,668,266,000			44,400,000,000	
04	Pengadaan Puskesmas Keliling	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif	Pusk. Kambang	2 Unit	900,000,000		3 Unit	1,500,000,000	
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas-puskesmas	Pusk. Tj. Makmur Pusk. Balai	5 Pusk	6,810,266,000		Puskesmas RD Dokter	8,000,000,000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan	12 Kec Batang Kapas Koto XI Tarusan Bayang Utara Pancung Soal Lunang Bayang Utara Sutera		2,000,000,000 350,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 350,000,000 350,000,000		5 Pusk	3,000,000,000	
	Pustu Tuik								
	Pustu Sei Lundang								
	Pustu Pancung Taba								
	Pustu Kudo - Kudo								
	Puskesmas Tanjung Beringin								
	Puskesmas Asam Kumbang								
	Rehab Rumah Dinas Dokter Surantih								
	Pembangunan Pagar Pembatas Tebing Puskesmas Rahul								

24.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Representatif			2,700,000,000		2 Unit	5,000,000,000	
	Rehab Puskesmas Tarusan		Koto XI Tarusan		2,500,000,000				
	Rehab Pustu Pulau Karam		Koto XI Tarusan		200,000,000				
25.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)	Tersedia Dana Untuk Operasional Penunjang Kegiatan			350,000,000			500,000,000	
26.	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	Tersedianya Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Gigi di	Pusk	18 Pusk	833,000,000			20,000,000,000	
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas	Perbaikan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	Pusk	1 Paket 20 Pusk	75,000,000		20 Unit	100,000,000	
29.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Tersedianya IPAL Untuk Puskesmas	Pusk	9 Unit	-		9 Unit	6,300,000,000	
26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA				-			30,000,000,000	
18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Rumah Sakit	1 paket	-		1 paket	30,000,000,000	
27.	Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Rumah Sakit	1 paket	-		1 paket	60,000,000,000	
28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN				26,200,000,000			26,479,807,668	
01.	Kemitraan Asuransi Kesehatan masyarakat	Pembayaran Premi Asuransi untuk Jamkesda	Dinkes	100%	6,300,000,000			6,300,000,000	
09.	Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien Gratis	Dinkes	100%	1,300,000,000			1,029,807,668	
11.	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien JKN, Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas dan Rumah	Pusk & RS	100%	17,500,000,000			17,600,000,000	
12.	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pembayaran Insentif Jasa Pelayanan dari Pasien JKN yang Dirujuk, Rawatan, Persalinan, dll	Dinkes	100%	1,100,000,000			1,550,000,000	
30.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Lansia yang Mendapat Pelayanan Kesehatan			175,619,042			85,000,000	
01.	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Menurunnya Angka Kesakitan Pada Lansia	Dinkes & 18 Pusk	87%	175,619,042		87%	85,000,000	
32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)			3,264,916,522			3,844,780,500	
04.	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes & 18 Pusk		126,036,522		85%	650,900,500	
05.	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (Prasekdan Usek)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Kelompok Anak Sekolah UKS dan UKGS dan Peduli Remaja (PKPR) Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Dinkes & 18 Pusk	100%	40,000,000		85%	95,000,000	
	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (jampersal) DAK Non Fisik	Menurunnya Angka Kematian Ibu Maternal dan Bayi serta Anak Balita melalui Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak, tersedianya jaminan persalinan untuk pasien tidak mampu yang tidak memiliki kartu, tersedianya RTK dikecamatan	Kec & Pusk		3,098,880,000		85%	3,098,880,000	

33.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Nagari dengan Posbindu PTM			287,859,478			415,522,627	
01.	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah Pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak menular		9 Jenis	100,000,000			135,522,627	
02.	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok	Jumlah Pencegahan dan pengendalian Penyakit akibat rokok dan deteksi dini	20 Puskesmas	9 Jenis	75,000,000			85,000,000	
03.	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Matra	20 Puskesmas		40,000,000		90%	95,000,000	
04.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ yang dilayani	20 Puskesmas	 Org	72,859,478			100,000,000	
35.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT				4,000,000,000			5,000,000,000	
01.	Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan	Pembayaran honorarium pelaksanaan dan insentif jasa medis paramedis tenaga PNS / NON PNS, terlaksananya operasional RSUD, terlaksananya pengadaan di RSUD	RSU Tapan		4,000,000,000			5,000,000,000	
	TOTAL				74,182,667,000			180,287,565,599	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 disajikan pada tabel 3.2 diatas. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA Tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2019 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan arah kebijakan tahun 2019 dalam RPJMD adalah meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, program Prioritas Dinas Kesehatan tahun 2019 adalah Program Kesehatan ibu dan anak yang setiap tahunnya Angka Kematian ibud dan bayi menjadi isu-isu di bidang kesehatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2018.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, RENJA ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.